

## IMPLEMENTASI KONSEP DASAR KEBIJAKAN PENIDDIKAN ISLAM DI INDONESIA

Farid Setiawan,<sup>1</sup> Abdan Syakur Ramadhan,<sup>2</sup> Tanti Julianti,<sup>3</sup>  
Sugeng Widodo,<sup>4</sup> Yuike Silvira.<sup>5</sup>

[Farid.setiawan@pai.uad.ac.id](mailto:Farid.setiawan@pai.uad.ac.id),<sup>1</sup> [syakurabdan519@gmail.com](mailto:syakurabdan519@gmail.com),<sup>2</sup>  
[tanti1900031259@webmail.uad.ac.id](mailto:tanti1900031259@webmail.uad.ac.id),<sup>3</sup> [Widodosugeng872@gmail.com](mailto:Widodosugeng872@gmail.com),<sup>4</sup>  
[yukesilvira33@gmail.com](mailto:yukesilvira33@gmail.com)<sup>5</sup>

Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta

### **Abstract**

*Education is one of the determining factors for the progress of a nation in the future. And to realize an education into quality education, a policy is needed to regulate the process of running an education. And by implementing a good policy in education, it will be able to help education in Indonesia to solve various problems that exist, especially problems that exist in education itself. This study aims to analyze the implementation of the basic concepts of Islamic education policy in Indonesia and to find out about the meaning of Islamic education policy, the functions and principles of policy, types and problems of policy, the process of analyzing educational policies, and strategies for implementing education policies. The method used in this research is to use the library research method, in which the researcher examines journals, books, notes, and others, as well as examines the results of existing studies, as well as other data collected. relevant. The results of this study are 1) Implementation of Islamic education policies, 2) Functions and principles of educational policy analysis, 3) Types and Problems of Education Policies, 4) Education Policy Analysis Process, 5) Education Policy Implementation Strategies.*

**Keywords:** *Policy Implementation, Education, Islamic education*

### **Abstrak**

Pendidikan merupakan salah satu faktor penentu kemajuan suatu bangsa di masa mendatang nanti. Dan untuk mewujudkan suatu pendidikan menjadi pendidikan yang berkualitas, maka diperlukan yang namanya kebijakan, untuk mengatur proses jalannya suatu pendidikan. Dan dengan mengimplementasikan suatu kebijakan yang bagus didalam pendidikan maka akan bisa membantu pendidikan di Indonesia ini untuk memecahkan bermacam-macam persoalan yang ada, terutama persoalan yang ada didalam pendidikan itu sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi konsep dasar kebijakan pendidikan islam di Indonesia dan untuk mengetahui mengenai pengertian kebijakan pendidikan islam, fungsi dan prinsip kebijakan, jenis-jenis dan problem kebijakan, proses analisis kebijakan pendidikan, dan strategi implementasi kebijakan pendidikan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah dengan menggunakan metode studi pustaka atau library research, yang dimana peneliti menelaah jurnal, buku-buku, catatan-catatan, dan lain-lainnya, serta menelaah hasil kajian yang sudah ada, dan juga data-data lainnya yang relevan. Adapun hasil dari penelitian ini yaitu 1) Implementasi kebijakan pendidikan islam, 2) Fungsi dan

prinsip analisis kebijakan pendidikan, 3) Jenis-jenis dan Problem Kebijakan Pendidikan, 4) Proses Analisis Kebijakan Pendidikan, 5) Strategi Implementasi Kebijakan Pendidikan.

**Kata Kunci :** Implementasi Kebijakan, Pendidikan, pendidikan Islam

## **A. PENDAHULUAN**

Manusia ialah makhluk yang sangat sempurna di antara makhluk-makhluk lainnya, dan tidak hanya itu manusia juga berbeda dengan makhluk-makhluk lainnya baik itu dari segi keunikannya yang beragam, dari segi kehidupannya yang berbeda-beda dan lain sebagainya, bahkan para ahli sejarah sekalipun telah melakukan penelitiannya dan hasilnya tidak berbeda jauh dengan para ahli sejarahnya, yaitu bahwa manusia merupakan makhluk unik yang berbeda dengan makhluk lainnya. Manusia diciptakan untuk menjadi khalifah di muka bumi hal ini dikarenakan manusia merupakan makhluk sempurna di antara makhluk-makhluk lainnya. Pendengaran, penglihatan, perasaan dan akal pikiran merupakan tiga potensi dasar yang disebutkan di dalam Al-Qur'an selain tubuh dan jasad. Ilmu pengetahuan merupakan hal terpenting bagi kehidupan manusia dan tiga potensi dasar tersebut merupakan alat untuk menerima segala pengetahuan bagi manusia, tiga potensi dasar tersebut dapat dikatakan sebagai penginderaan manusia dan penginderaan manusia tersebut ada sejak nabi Adam as menerima pengetahuan di alam surga, sehingga pendidikan pun dimulai sejak manusia pertama ada yaitu nabi Adam as.

Tanpa adanya pendidikan, maka tiga potensi dasar tersebut tidak akan berkembang atau akan sulit untuk berkembang, oleh karena itu pendidikan di sini sangatlah penting bagi kehidupan manusia, sejak lahir atau sejak kecil manusia harus dididik jika tidak manusia tersebut akan merasakan kebodohan atau ketidakpahaman ketika dewasa, baik itu dari segi keilmuan ataupun kehidupan sehari-hari, dan dengan pendidikan tersebut manusia dapat dibedakan antara makhluk yang paling sempurna dengan makhluk lainnya, karena di dalam agama Islam itu sendiri, juga diwajibkan menuntut Ilmu bagi kaum muslimin dan muslimat yang mana di dalam hadits telah disebutkan "Tholabul 'ilmu faridhotun 'alaa kulli muslimin wal muslimat mainal Mahdi ilal lahdi". Yang artinya: "Menuntut Ilmu itu wajib bagi setiap

muslim dan muslimah sejak dari ayunan hingga liang lahat”<sup>1</sup>, dan dari hadits ini telah diketahui bersama bahwasannya menuntut Ilmu wajib bagi kaum muslimin dan muslimat.<sup>2</sup>

Akal dan perasaan manusia merupakan kategori dari makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna, jadi eksistensi dari manusia itu sendiri hampir tidak dapat di temukan jawaban yang tepat, sehingga akal dan perasaan tersebut lah yang menjadi jawaban dari eksistensi dari manusia itu sendiri. Akan tetapi di sisi lainnya seperti dalam kehidupan manusia satu dengan manusia lainnya atau dengan lingkungannya secara penilaian telah mencapai titik nadir, sehingga jawaban tersebut masih belum absolut kebenarannya.

Hal tersebut dikaitkan dengan kebijakan, dengan adanya keberadaan manusia tersebut yaitu seperti menjadi actor dalam kebijakan baik itu dalam pemerintahan atau dalam suatu bidang, sehingga sebagai penulis kami ingin mengangkat sebuah judul tersebut, untuk mendalami lebih lanjut tentang pendidikan dan tentang kebijakan di Indonesia.

## **B. METODE**

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode studi pustaka (library research), dimana peneliti menelaah jurnal, buku-buku, catatan-catatan, dan lain-lain yang tidak berkaitan dengan angka. Studi pustaka merupakan sebuah metode dalam penelitian yang digunakan untuk memperoleh sebuah data dari menganalisis buku-buku, jurnal, literatur-literatur, dan catatan-catatan lainnya yang berkaitan dengan masalah yang akan diselesaikan. Dengan menggunakan metode pustaka data sekunder yang diperoleh dengan cara membaca buku, membaca jurnal, menelaah hasil kajian yang sudah ada, serta data-data lainnya yang relevan.

Menurut Kaelan, ada dua tahap dalam teknik analisis data pada penelitian kepustakaan ini. Pertama, analisis pada saat pengumpulan data, ini ditujukan untuk lebih menangkap esensi atau inti dari fokus penelitian yang akan dilakukan melalui sumber-sumber yang dikumpulkan dan terkandung dalam rumusan verbal kebahasaan, proses ini dilakukan aspek demi aspek, sesuai dengan peta penelitian. Kedua, setelah dilakukan proses pengumpulan data itu, selanjutnya menganalisis kembali setelah data terkumpul yang berupa data mentah yang harus ditentukan hubungan satu sama lain.

---

<sup>1</sup> H.R.Ibnu majah

<sup>2</sup> Imam S. Tujuan Pendidikan Islam. *Al-Tadzkiyyah*. 2015;6(November):1-16.

## C. PEMBAHASAN

### 1. Implementasi kebijakan Pendidikan Islam

Implementasi artinya perwujudan ataupun pemakaian, Arti tersebut dapat di temukan di dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI). Dan Implementasi tersebut dapat dihubungkan dengan kegiatan yang dilakukan untuk menggapai suatu tujuan. Dalam mengimplementasikan sesuatu haruslah diikuti dengan fasilitas dan sarana-prasarana yang membantu, yang akan memicu pengaruh maupun efek pada sesuatu kegiatan tersebut. Dan tidak hanya itu, implementasi kebijakan juga dapat di artikan sebagai suatu usaha untuk menggapai tujuan tertentu, dengan fasilitas tertentu, juga dalam jangka waktu tertentu. Dan ada juga yang mengungkapkan bahwa implementasi kebijakan adalah kegiatan yang dibuat untuk mewujudkan suatu kebijakan.

Usaha dalam menjalankan, mengadakan, juga mengusahakan keputusan kebijakan dan pilihannya yang sudah diputuskan, dengan impian bisa mendapatkan keputusan yang sinkron dengan tujuan dari suatu kebijakan, itu lah beberapa kesimpulan dari pengertian-pengertian implementasi kebijakan. Dan selain itu ada juga tujuan dari implementasi kebijakan, yaitu untuk memastikan arah, supaya tujuan dari kebijakan bisa diwujudkan.

Adapun pengertian dari konsep ialah suatu pengabstrakan yang menjabarkan ciri-ciri yang terlihat dari kelompok objek, maupun dari insiden lain. Konsep juga dapat didefinisikan sebagai gambaran psikologis pada objek, proses, maupun segala sesuatu yang ada di luar bahasa, dan dimanfaatkan atau yang di gunakan oleh daya pikir dalam menafsirkan sesuatu lainnya.

Kebijakan juga dapat dihubungkan dengan usulan pengarahan organisasi yang mana terdapat model formal yang sama-sama didapatkan melalui pemerintah, dan dengan itu mereka berjuang untuk mewujudkan tujuannya. Selain itu kebijakan juga dapat didefinisikan dengan kepintaran, kelebihan, kumpulan konsep dan niat yang merupakan poin terbanyak serta dasar perencanaan dalam melaksanakan pekerjaan.<sup>3</sup>

Beralih kepada pendidikan, terkhususnya pendidikan yang ada di Indonesia itu sendiri, yaitu Pendidikan merupakan model perubahan cara berpikir dan kebiasaan manusia supaya menjadi manusia yang lebih baik, adapun kebiasaan manusia yang di maksud ialah kebiasaan sehari-hari mulai dari kebiasaan di rumah, di sekolah, maupun di

---

<sup>3</sup> Tim Penyusun. (2001). Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi 3, cet, 1, Jakarta: Balai Pustaka. hlm. 149.

masyarakat, baik itu terkait dengan budi pekerti, tingkah laku, kemandirian dan lain sebagainya. Semua itu berasal dari pendidikan, oleh karenanya pendidikan seharusnya sudah di berikan sejak kecil, karena pembentukan kebiasaan akan mudah di bentuk sejak kecil, dan sejak kecil itulah manusia seharusnya sudah di bentuk dengan kebiasaan-kebiasaan baik, sehingga ketika manusia beranjak dewasa, manusia akan terbiasa dengan perbuatan-perbuatan baik, dan semua itu melalui pendidikan.<sup>4</sup> Beralih kepada UU No. 20 Tahun 2003 yang isinya ialah pendidikan merupakan kesengajaan untuk mengimplementasikan keadaan belajar dan proses belajar, supaya para murid dengan aktif bisa mengembangkan kemampuan diri mereka untuk mempunyai jiwa spiritual, control diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak yang baik, juga keterampilan yang dibutuhkan dirinya sendiri, masyarakat luas, serta negara.<sup>5</sup>

Adapun pengertian pendidikan Islam adalah Proses perubahan, penghayatan ilmu pengetahuan dan nilai Islami pada murid dengan menumbuhkan serta mengembangkan potensi fitrah mereka dalam menggapai keseimbangan dan keutuhan hidup dalam segala perspektifnya. Sehingga ketika para murid telah menumbuhkan dan mengembangkan potensi-potensi fitrah di dalam dirinya, maka para murid tersebut akan mengerjakan kewajibannya baik itu kewajiban dalam beribadah maupun kewajiban dalam kegiatan-kegiatan sehari-hari.

Jika dikaitkan antara kebijakan dan pendidikan, maka dapat diartikan bahwa kebijakan pendidikan merupakan suatu penilaian terhadap bentuk nilai dan aspek-aspek kebutuhan situasi yang tepat, yang diproses pada sebuah lembaga sebagai perencanaan umum untuk petunjuk mengambil keputusan, supaya tujuan pendidikan yang dikehendaki dapat digapai. Kebijakan pendidikan di Indonesia bertumpu pada hukum yang diatur oleh pemerintah, sehingga tidak jarang kebijakan-kebijakan yang dibuat sering sekali mengalami perubahan, hal tersebut di karenakan sering sekali bergantinya para pemimpin dari pemerintah itu sendiri, sehingga mengakibatkan perubahan-perubahan pada kebijakan- kebijakan yang di buat oleh pemerintah. Mulai dari kebijakan yang tertinggi sampai terendah.

Dan dari berbagai definisi diatas bisa dikonklusikan bahwa kebijakan pendidikan Islam merupakan pengambilan keputusan serta asas yang merupakan pegangan dan dasar

---

<sup>4</sup> Ibid, 338

<sup>5</sup> Undang-Undang SISDIKNAS, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2008, hlm: 03

rencana dalam mewujudkan pendidikan Islam itu sendiri yang sesuai dengan nilai-nilai keislaman.

## **2. Fungsi dan prinsip analisis kebijakan pendidikan**

Telah diketahui bersama bahwasannya pendidikan merupakan hal utama bagi manusia dalam menjalani hidup sehari-hari, dengan adanya pendidikan maka manusia akan mengetahui perbuatan yang baik dan perbuatan yang buruk, tidak ganya itu, dengan adanya pendidikan manusia juga dapat hidup secara mandiri tanpa adanya ketergantungan kepada orang lain sepenuhnya.

Oleh karena itu, di dalam pendidikan perlu adanya suatu kebijakan, yang mana kebijakan tersebut diharapkan dapat menjamin kesejahteraan rakyat, dan di sini perlu adanya sebuah analisis tentang fungsi kebijakan pendidikan, supaya masyarakat tahu fungsi dari kebijakan itu sendiri, dan fungsi dari analisis kebijakan pendidikan itu sendiri ialah supaya layanan pendidikan dapat mencapai ketertiban, dapat memberikan atau menjamin layanan pendidikan kepada warga, layanan pendidikan dapat terprogram atau dapat berjalan secara efektif, para actor pendidikan dapat melaksanakan pendidikan, dan administrasi bisa diwujudkan secara tertib.<sup>6</sup>

Dalam kebijakan pendidikan juga terdapat beberapa prinsip-prinsip kebijakan itu sendiri, diantaranya : *Pendidikan* mempunyai nilai-nilai tersendiri, dan nilai-nilai tersebut harus mewarnai setiap kebijakan Negara dalam berbagai bidang sehingga aspek-aspek kemanusiaan, keadilan social, keadilan ekonomi, pemerintahan, pembangunan, keadilan hukum mencerminkan keadilan suatu bangsa yang bermoral dan bermartabat. *Nilai-nilai* pendidikan seharusnya juga dapat menjiwai sistem perpolitikan, prinsip penyelenggaraan negara dan tata kelola pemerintahan. Pendidikan berperan memberikan saran untuk masukan berupa penguasaan kompetensi serta aspek keprofesionalitas dan tidak kalah pentingnya juga harus mengubah moral dalam dunia perpolitikan. *Masing-masing* individu atau setiap orang pasti memiliki sifat dan perilaku yang berbeda, yang mana perilaku tersebut dilator belakang oleh kebudayaan atau adat dari tiap individu tersebut, akan tetapi semua itu tidak menyurutkan setiap individu untu senantiasa saling menghormati dan menghargai. *Proses* perubahan dan menjadi lokomotif ilmu pengetahuan serta teknologi, sudah seharusnya di

---

<sup>6</sup> Hastuti, T. P., & Soehartono, S. (2018). Kebijakan Pendidikan Di Tinjau Dari Segi Hukum Kebijakan Publik. *Jurnal Jurisprudence*, 8(1), 34–41. <https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v8i1.6293>

miliki oleh pendidikan itu sendiri sebagai garda terdepan, karena pendidikan merupakan pusat atau inti dari perkembangan peradaban berbagai macam bangsa dengan mengubah pola pikir.<sup>7</sup>

### **3. Jenis-jenis dan Problem Kebijakan Pendidikan.**

Adapun jenis-jenis kebijakan yang di kemukakan oleh Andreson, diantaranya, *yang pertama*, Substantive policies merupakan materi, isi, atau kebijaksanaan. Contohnya, kebijaksanaan dibidang pendidikan, hukum, perburuan; *Kedua*, Procedural policies ialah menyangkut siapa, kelompok mana dan pihak mana yang terlibat dalam merumuskan dan melaksanakan kebijaksanaan. Contohnya, dalam merancang, membuat dan melaksanakan Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional; *Ketiga*, Distributive policies merupakan kebijaksanaan yang memberikan pelayanan atau keuntungan kepada sejumlah masyarakat; *Keempat*, Redistributive policies merupakan kebijaksanaan yang tujuannya memindahkan hak, kepemilikan, kepunyaan pada masyarakat. Contohnya, pemindahan hak dari kalangan berkecukupan dan kalangan yang tidak berkecukupan; *Dan yang kelima*, Regulatory policies merupakan kebijaksanaan dengan memberikan batasan atas tindakan kepada seseorang maupun sekelompok orang. Contohnya, batasan penjualan pakaian atau kerajinan yang baru saja diproduksi.

Dari penjelasan di atas dapat di ambil kesimpulan bahwasannya kebijakan ialah suatu peraturan yang mana peraturan tersebut berkaitan dengan sebuah kegiatan-kegiatan guna tercapainya sebuah kesuksesan atau kemaksimalan di dalam kegiatan tersebut. Di Indonesia sendiri kebijakan digerakkan oleh pemerintahan, sehingga sering sekali kebijakan di Indonesia mengalami perubahan tergantung peta politik yang di jalankan oleh pemerintah tersebut dan peta politik tersebut dapat berubah dengan seiringnya perubahan kepemimpinan yang dilakukan oleh pemerintah. Akan tetapi kebijakan-kebijakan yang di buat oleh pemerintah tersebut masih terdapat problem dari kebijakan .yang di buat salah satu contohnya ialah ketika era reformasi dalam UU No.20 tahun 2003 pasal 1 ayat 1. Dari UU tersebut masih terdapat perubahan sistem yang di dikeluarkan oleh pemerintah, dan perubahan kebijakan tersebut tentunya harus mementingkan rakyatnya. Dan problem dari kebijakan pendidikan tersebut masih bersifat nasional atau masih bersifat wacana, sehingga kebijakan

---

<sup>7</sup> Yanti, S. (2020). Analisis Kebijakan Pendidikan. In *Lentera: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies* (Vol. 1, Issue 1). <https://doi.org/10.32505/lentera.v1i1.1662>



yang dikeluarkan oleh pemerintah belum maksimal dalam pelaksanaannya, sehingga problem-problem kebijakan seperti inilah yang seharusnya ditiadakan, guna mencapai suatu kebijakan yang dapat mensejahterakan rakyatnya.

#### **4. Proses Analisis Kebijakan Pendidikan**

Sejarah manusia tidak terlepas dari analisis kebijakan hal ini di karenakan analisis kebijakan merupakan suatu prosedur berfikir manusia yang mana prosedur berfikir tersebut sudah lama di kenal. Memecahkan masalah publik dengan menggunakan argumentasi rasional yang mana argumentasi tersebut harus di lakukan dengan suatu di siplin ilmu sosial terapan, sehingga argumentasi rasional tersebut dapat memberikan fakta-fakta untuk menjelaskan serta menilai dalam menyelesaikan atau memecahkan masalah publik. Dan di sisi lain kebijakan juga dapat di artikan sebagai suatu langkah atau prosedur dalam pemecahan suatu masalah dengan menggunakan pemahaman manusia itu sendiri.

Proses analisis kebijakan di sini ialah suatu metode yang mana metode tersebut dapat mendisiplinkan ilmu sosial, dan tidak hanya itu proses analisis kebijakan juga di lakukan dengan cara mengumpulkan argumentasi secara beganda serta memanfaatkan informasi yang ada guna memecahkan permasalahan-permasalahan yang terdapat di dalam suatu kebijakan.

Kata kebijakan ialah suatu proses atau sebuah tindakan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di dalam sebuah lingkungan, sehingga tindakan tersebut dapat di katakan sebagai tindakan yang mementingkan permasalahan yang di hadapi orang lain atau permasalahan-permasalahan yang di hadapi secara umum yang mana tindakannya dapat bermanfaat bagi kehidupan orang lain. Educational policy atau dapat di katakan sebagai kebijakan pendidikan yang mana kebijakan pendidikan tersebut mamiliki arti yang sama dengan kebijakan pemerintah di dalam sebuah bidang yaitu bidang pendidikan. Mutu pendidikan itu sendiri merupakan hasil dari produk satuan atau orang-orang yang terpilih, sehingga orang-orang tersebut dapat di katakan sebagai pembuat kebijakan pendidikan.

Emosional dan irasional merupakan faktor yang berasal dari sebuah keputusan, yang mana keputusan tersebut berasal dari suatu penekanan kebijaksanaan, dan telah di ketahui bersama bahwasannya kebijakan merupakan hasil murni dari pertimbangan akal manusia, sehingga dalam pemilihan opsi-opsi kebijakan tersebut manusia lebih dominan terhadap



pemihan opsinya. Dan dari sini telah kita ketahui bersama bahwasannya kebijakan terdahulu masih belum rasional atau dapat di katakana bahwa kebijakan rasional pada zaman dulu masih belum tercapai, sehingga kebijakan terdahulu masih berasal dari emosional dan irasional.

Pendidikan yang maju atau pendidikan yang sesuai dengan cita-cita merupakan hasil dari adanya kebijakan pendidikan, yang mana kebijakan tersebut berisikan beberapa aturan dan aturan tersebut berpihak atau di miliki oleh pemerintah. Tata aturan, politik, pemberdayaan, anggaran dan lain sebagainya, semua itu merupakan hasil dari keberpihakannya pemerintah terkait kebijakan pendidikan itu sendiri.<sup>8</sup>

Input dan output merupakan suatu proses kebijakan yang mana proses kebijakan tersebut memiliki beberapa arti, untuk input proses kebijakan sendiri memiliki arti rancangan atau agenda pemerintah terkait proses kebijakan, sedangkan output proses kebijakan itu sendiri memiliki arti kinerja pemerintah terkait proses kebijakan itu sendiri. Dan di dalam sebuah kinerja terdapat yang namanya evaluasi, dan adanya evaluasi tersebut bertujuan sebagai gambaran pencapaian suatu kinerja, agar kinerja kebijakan tersebut dapat mencapai target yang di inginkan atau yang di harapkan.<sup>9</sup>

## **5. Strategi Implementasi Kebijakan Pendidikan**

Berada dalam sebuah kerangka organizing-controlling sudah seharusnya menjadi bagian dari implementasi kebijakan dalam konteks manajemen, dan setelah adanya sebuah kebijakan maka sudah seharusnya di laksanakan terkait kebijakan tersebut, guna mencapai sebuah tujuan yang baik untuk kedepannya dalam pelaksanaan kegiatan yang ingin di lakukan.<sup>10</sup>

Pemerintah pusat merupakan desentralisasi pengelolaan pendidikan ke daerah otonom yang menempatkan kabupaten atau kota sebagai sentra desentralisasi. Selain itu pemerintah juga berhak dalam pergeseran kewenangan yang berkaitan erat dengan konsentrasi perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan.

---

<sup>8</sup> Sari W, Rifki AM, Karmila M. Pembelajaran Jarak Jauh Pada Masa Darurat Covid 19. *J Mappesona*. 2020;(1):1-13

<sup>9</sup> Bakry A. Kebijakan Pendidikan sebagai Kebijakan Publik. *J MEDTEK*. 2010;2(1):1-13.

<sup>10</sup> Yuliah, E. (2020). Implementasi Kebijakan Pendidikan The Implementation of Educational Policies Elih Yuliah Pengawas Sekolah di Kementrian Agama , Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sukabumi , Jawa Barat , Indonesia . *Jurnal At-Tadbir: Media Hukum Dan Pendidikan*, 30(2),

Di Indonesia saat ini telah memiliki yang namanya kondisi birokrasi dan kondisi persekolahan, dengan adanya kondisi-kondisi tersebut, maka pendidikan di sekolah harus mempersiapkan SDM, strategi pembelajaran, serta pengelolaan pendidikan di sekolah tersebut, dan tidak hanya itu pendidikan di sekolah juga harus mempersiapkan anggaran sarana dan prasarana serta stake holders. Secara garis besar pentahapan tersebut dapat dibagi menjadi tiga tahap, yang pertama tahap sosialisasi, Luasnya wilayah nusantara menyebabkan betapa pentingnya tahapan-tahapan sosialisasi, terutama di wilayah yang media informasi baik cetak maupun elektronik sangat banyak, dan tidak hanya itu sosialisasi sangat di butuhkan dalam kehidupan di masyarakat, baik itu di sekolah, di rumah maupun di jalan sekalipun, sosialisasi sangat penting agar dapat beradaptasi dengan baik dalam lingkungannya. Yang kedua tahap piloting, tahap ini sangat penting bagi penerapan manajemen berbasis sekolah, dan tahap piloting ini sangat di butuhkan bagi penerapan management sekolah tersebut supaya tidak mengundang resiko, dan semua tahapan tersebut mencakup beberapa point, yaitu dapat diterima oleh masyarakat, dapat dipertanggungjawabkan baik secara konsep, operasional maupun pendanaan, dapat direplikasikan di sekolah lain, dan program tersebut dapat terus dikembangkan meskipun tahap uji coba telah selesai. Dan yang ketiga tahap Desiminasi, tahap yang sangat berpengaruh kepada sekolah yang fasilitasnya sangat kurang sekali, dan proses atau tahapan ini memberikan anggaran, fasilitas, dan keuangan yang memadai bagi sekolah yang membutuhkan, dan semua tahapan desiminasi tersebut berasal dari pemerintah. Proses desiminasi ini memerlukan pentahapan, disebabkan kondisi wilayah yang luas dan jumlah sekolah yang cukup besar daya variabilitasnya yang sangat beragam.<sup>11</sup>

#### **D. SIMPULAN**

Implementasi dapat di artikan sebagai pelaksanaan atau penerapan suatu kegiatan guna mencapai suatu tujuan tertentu, oleh karenanya dapat di ambil kesimpulan bahwa untuk melakukan sesuatu harus disertai sarana yang mendukung yang nantinya akan menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu itu. Sedangkan Kata kebijakan ialah

---

<sup>11</sup> S.Sa'ud, U. (2002). *Kebijakan\_Pend.-Indo-Bapenas\_2002*. 5–6.  
[http://file.upi.edu/Direktori/FIP/JUR.\\_ADMINISTRASI\\_PENDIDIKAN/195306121981031-UDIN\\_SYAEFUDIN\\_SA%27UD/Kebijakan\\_Pend.-Bapenas\\_2002.pdf](http://file.upi.edu/Direktori/FIP/JUR._ADMINISTRASI_PENDIDIKAN/195306121981031-UDIN_SYAEFUDIN_SA%27UD/Kebijakan_Pend.-Bapenas_2002.pdf)

suatu proses atau sebuah tindakan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di dalam sebuah lingkungan, sehingga tindakan tersebut dapat di katakana sebagai tindakan yang mementingkan permasalahan yang di hadapi orang lain atau permasalahan-permasalahan yang di hadapi secara umum yang mana tindakannya dapat bermanfaat bagi kehidupan orang lain. Sejarah manusia tidak terlepas dari analisis kebijakan hal ini di karenakan analisis kebijakan merupakan suatu prosedur berfikir manusia yang mana prosedur berfikir tersebut sudah lama di kenal. Memecahkan masalah publik dengan menggunakan argumentasi rasional yang mana argumentasi tersebut harus di lakukan dengan suatu di siplin ilmu sosial terapan, sehingga argumentasi rasional tersebut dapat memberikan fakta-fakta untuk menjelaskan serta menilai dalam menyelesaikan atau memecahkan masalah publik. Proses analisis kebijakan di sini ialah suatu metode yang mana metode tersebut dapat mendisiplinkan ilmu sosial, dan tidak hanya itu proses analisis kebijakan juga di lakukan dengan cara mengumpulkan argumentasi secara beganda serta memanfaatkan informasi yang ada guna memecahkan permasalahan-permasalahan yang terdapat di dalam suatu kebijakan.

## REFERENSI

- Ahmad Saifuddin. (2015). EKSISTENSI KURIKULUM PESANTREN DAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 3(1), 211-234.
- Bakry, A. (2010). Kebijakan Pendidikan Sebagai Kebijakan Publik. *Jurnal MEDTEK*, 2(1), 1–13.
- Dr. H. A. Rusdiana, MM. (2014). Buku Daras: KEBIJAKAN PENDIDIKAN. BANDUNG : PUSTAKA SETIA BANDUNG.
- Elih Yuliah. (2020). Implementasi Kebijakan Pendidikan The Implementation of Educational Policies. *Jurnal at-Tadbir: Media Hukum dan Pendidikan*, 30(2).
- Hastuti, T. P., & Soehartono, S. (2018). Kebijakan Pendidikan Di Tinjau Dari Segi Hukum Kebijakan Publik. *Jurnal Jurisprudence*, 8(1), 34–41.
- H. Mohammad Emnis Anwar. (2014). MENELUSURI KEBIJAKAN PENDIDIKAN ISLAM DI INDONESIA. *Edukasi Islami Jurnal Pendidikan Islam*, (3).
- Imam, Syafe'i. (2015). Tujuan Pendidikan Islam. *Al-Tadzkiyyah* 6 (November), 1–16.
- Kusumawati, Mustika Prabaningrum. (2019). “Harmonisasi Antara Etika Publik Dan Kebijakan Publik.” *Jurnal Yuridis*, 6(1), 1–23.
- Moh. Rifa'i. (2017). Kebijakan Pendidikan Islam Dalam era otonomi daerah. *Jurnal Al-Tanzim: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 1(1).
- Prasetya, B. (2019). Mengungkap Analisis Dan Evaluasi Kebijakan Tentang Pendidikan Agama Dan Keagamaan. *Conciencia*, 19(2), 99–111.  
<https://doi.org/10.19109/conciencia.v19i2.4395>

- Rachmad Sobri. (2019). POLITIK DAN KEBIJAKAN TENTANG PENDIDIKAN AGAMA DAN KEAGAMAAN DI INDONESIA. *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam*, 8(1).
- Sari, Widya, Andi Muhammad Rifki, dan Mila Karmila. (2020). Pembelajaran Jarak Jauh Pada Masa Darurat Covid 19. *Jurnal Mappesona*, (1), 1–13.
- S.Sa'ud, U. (2002). *Kebijakan\_Pend.-Indo-Bapenas\_2002*. 5–6.
- Syafaruddin. (2008). Efektivitas Kebijakan Pendidikan: Konsep, Strategi, Dan Aplikasi Kebijakan Menuju Organisasi Sekolah Efektif, Rineka Cipta, Jakarta. Hlm 75.
- Tatang Hidayat, Ahmad Syamsu Rizal, dan Fahrudin. (2018). PENDIDIKAN DALAM PERSPEKTIF ISLAM DAN PERANANNYA DALAM MEMBINA KEPERIBADIAN ISLAMI. *Jurnal Mudarrisuna*, 8 (2).
- Yanti, S. (2020). Analisis Kebijakan Pendidikan. In *Lentera: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies* (Vol. 1, Issue 1).  
<https://doi.org/10.32505/lentera.v1i1.1662>
- Yuliah, E. (2020). Implementasi Kebijakan Pendidikan The Implementation of Educational Policies Eliah Yuliah Pengawas Sekolah di Kementrian Agama , Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sukabumi , Jawa Barat , Indonesia I . PENDAHULUAN Langkah panjang dari suatu proses kebija. *Jurnal At-Tadbir: Media Hukum Dan Pendidikan*, 30(2), 16–40.